

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembahasan mengenai unifikasi yang dilakukan oleh Yaman Utara dan Yaman Selatan dapat dikaji dengan lebih terdahulu mengetahui peristiwa setelah Perang Dunia berakhir pada tahun 1945. Setelah Perang Dunia II berakhir, munculkan dua negara *superpower* yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara tersebut merupakan pihak yang memenangkan peperangan dalam Perang Dunia II dan keduanya memiliki ideologi yang saling bersebrangan, Amerika Serikat dengan sistem Liberal/Kapitalisme serta Uni Soviet dengan sistem Komunisme/Marxisme-Leninisme-nya. Pemenang perang tersebut kemudian masing-masing saling berlomba-lomba dalam menancapkan pengaruhnya di negara lain, khususnya di negara-negara berkembang. Masa ini lah yang dalam sejarah dunia disebut Perang Dingin. Pembahasan mengenai permasalahan yang dikaji oleh penulis yaitu mengenai unifikasi yang dilakukan oleh Yaman Utara dan Yaman Selatan pada tahun 1990 tidak akan lengkap jika tidak membahas dahulu mengenai Perang Dingin. Karena sebelum proses unifikasi yang dilakukan antara dua negara Yaman tersebut, negara ini terpisah oleh peristiwa Perang Dingin.

Salah satu dampak yang diberikan oleh Perang Dingin itu sendiri adalah terjadinya disintegrasi dalam sebuah negara, dimana dalam sebuah negara tersebut terdapat golongan yang dipengaruhi oleh sistem ideologi Liberal/Kapitalisme yang didukung langsung oleh Amerika Serikat dan sekutunya dan juga golongan yang terpengaruhi sistem Komunisme/Marxisme-Leninisme yang didukung langsung Uni Soviet dan negara-negara satelitnya serta oleh negara China.

Namun setelah terjadi perubahan arah dan kebijakan politik di negara Uni Soviet, Perang Dingin mulai mereda. Banyak negara yang melepaskan diri dari Uni Soviet terutama negara-negara yang berada di Eropa Timur dan Asia Tengah.

Selain itu banyak negara-negara yang berfaham sama seperti Uni Soviet namun letak geografisnya jauh dari Uni Soviet mulai melakukan perubahan-perubahan dalam segala aspek. Perubahan yang dilakukan oleh negara yang sebelumnya sangat bergantung kepada negara Uni Soviet salah satunya adalah melalui proses Unifikasi atau penyatuan kembali negara-negara yang sebelumnya terpisah oleh Perang Dingin. Proses unifikasi dilakukan oleh negara-negara yang awalnya terpecah oleh pengaruh dan kepentingan dalam Perang Dingin ini disebabkan oleh persamaan-persamaan yang terdapat dalam negara-negara tersebut, baik dari tujuan politik, persamaan kebudayaan, bangsa dan keadaan sosial yang dimana dari kesamaan tersebut kemudian mereka berencana untuk menggabungkan dua negara tersebut menjadi sebuah negara dengan satu pemerintahan.

Penulis sangat tertarik terhadap permasalahan yang terjadi di Yaman pada tahun 1990. Karena meskipun negara Yaman Utara dan Yaman Selatan telah bergabung, namun hingga saat ini dan setelah negara ini bergabung pun masih mengalami konflik dan belum mengalami kemajuan seperti negara-negara tetangga. Sebenarnya negara Yaman merupakan negara yang sangat kaya oleh sumber daya minyaknya namun dalam kemajuan dari segala aspek, Republik Yaman berbeda dengan negara tetangganya, yaitu Arab Saudi dan Oman yang sama-sama memiliki kekayaan minyak yang berlimpah. Yaman jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara tetangganya tersebut, baik dalam hal ekonomi maupun dalam bidang IPTEK nya. Selain dari bidang ekonomi dan IPTEK nya, pembangunan infrastruktur di Yaman juga sangat ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Hal ini disebabkan karena pendidikan yang berada di Yaman bisa dibilang tak mencukupi untuk disebut negara berkembang sekalipun. Yaman adalah negara termiskin di kawasan Timur Tengah dengan GDP per kapitanya hanya US\$ 2.600, terhitung kecil jika dibandingkan negara Afrika Utara yang tergolong kawasan Timur Tengah yaitu Tunisia yang mencapai US\$ 9.500 (Tamburaka, 2011, hlm.187).

Peristiwa unifikasi yang terjadi di Yaman pada tahun 1990 Yaman atau penyatuan antara dua negara Yaman yaitu Republik Arab Yaman (Yaman Utara)

dengan Republik Demokratik Rakyat Yaman (Yaman Selatan) merupakan salah satu dari beberapa negara lainnya yang melakukan unifikasi. Negara-negara lainnya yang terbentuk dengan proses unifikasi ialah negara Jerman (Jerman Barat dan Jerman Timur) dan Vietnam (Vietnam Utara dan Vietnam Selatan), serta beberapa negara lainnya. Untuk memperjelas dalam membahas mengenai peristiwa unifikasi Yaman, harus terlebih dahulu mengetahui mengenai letak geografis Republik Yaman. Penulis mengutip dalam buku George Lenczowski (1992 : hlm. 370) yang membahas mengenai letak geografis negara Yaman:

Yaman berada di Asia Barat Daya atau yang lebih tepat berada di sebelah selatan semenanjung Arab juga termasuk sebagian wilayah Timur Tengah. Berbatasan langsung dengan negara Arab Saudi di sebelah utara, negara Oman di sebelah timur, laut Arab di sebelah selatan, Teluk Aden dan Laut Merah di sebelah barat. Dari segi lingkungan alam negara ini mempunyai keuntungan karena memiliki curah hujan yang lebih tinggi dan tanah yang lebih subur daripada daerah Arabia lainnya.

Hal yang menarik lainnya bagi penulis adalah banyaknya konflik yang terjadi hingga saat ini juga merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di negara Yaman. Selain penjelasan konflik tersebut, terdapat konflik internal maupun konflik eksternal dari masalah agama (persaingan Sunni dan Syiah), perebutan kekuasaan hingga sengketa yang mengakibatkan terjadinya perang dengan negara tetangganya seperti kerajaan Arab Saudi. Sebenarnya konflik-konflik tersebut merupakan penghambat dalam proses Unifikasi atau penyatuan negara Yaman itu sendiri. Negara yang sebagian besar warganya beragama Muslim ini bahkan hingga saat ini masih mengalami konflik dan hal tersebut masih sama seperti masa ketika negara ini baru merdeka. (Lenczowski, 1992, hal.370). Konflik dan pertikaian yang terjadi di Yaman juga sebenarnya sudah ada sejak awal kemerdekaannya hingga akhirnya berujung pada terbentuknya dua negara Yaman, yaitu Republik Arab Yaman (Yaman Utara) dan Republik Demokratik Rakyat Yaman (Yaman Selatan). Konflik yang terjadi di Yaman dapat sangatlah berbeda dengan konflik lainnya, penulis mengutip penjelasan yang dikemukakan oleh Apriyadi Tamburaka (2011, hlm. 206):

Konflik di Yaman memang sangat kompleks, bahkan konflik di negara ini tidak dapat disamakan dengan konflik-konflik di wilayah lainnya seperti Pakistan, Iraq, dan Afghanistan. Konflik seperti inilah yang memperumit konflik di Yaman. Pemerintah yang berpusat di kota Sanaa tidak mau menampung aspirasi dari rakyatnya, baik yang berada di bagian Utara maupun yang berada di Selatan. Pada dasarnya konflik di Yaman dapat dikatakan sebagai perang antara pemerintah dan rakyatnya sendiri.

Untuk mengetahui lebih dalam pembahasan mengenai unifikasi Yaman ini, penulis mencoba terlebih dahulu sedikit menjelaskan mengenai keadaan dan permasalahan yang terjadi di wilayah Yaman Utara dalam latar belakang penulisan. Dalam membahas proses unifikasi di Yaman, kita tidak dapat hanya membahas satu wilayah saja, karena peristiwa ini melibatkan dua negara Yaman, yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan.

Mengenai Yaman Utara, jauh sebelum terjadinya proses Unifikasi di Yaman, A Joo Kim (2013) mengatakan bahwa Yaman Utara adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan, kerajaan yang berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Turki Ottoman pada tahun 1918. Namun kerajaan disini bukan seperti kerajaan-kerajaan yang sama dengan kerajaan pada umumnya yang selalu identik dengan pemimpin seorang raja. Yaman Utara merupakan kerajaan yang dipimpin oleh seorang Imam. Sedangkan Yaman Selatan setelah melepaskan diri dari cengkraman Imperialisme Inggris negara itu dengan cepat mendeklarasikan terbentuknya Republik Demokratik Rakyat Yaman dengan sistem pemerintahan meniru Uni Soviet (Kim, 2013, hlm.28).

Republik Arab Yaman (Yaman Utara) sebenarnya merupakan daerah bagian dari Kesultanan Turki Ottoman. Penguasaan Turki terhadap daerah Yaman bagian utara sudah berlangsung selama berabad-abad. Namun dengan kekalahan Turki pada saat Perang Dunia I, Yaman bagian utara akhirnya merdeka sepenuhnya dari penjajah pada tahun 1918 (Lenczowski, 1992, hlm.370).

Pada saat itu di Yaman Utara tidak ada pemimpin selain Imam Yehya, kemudian secara otomatis Imam pun langsung menjadi penguasa tunggal di daerah Yaman Utara. Sebenarnya negeri. Saat awal kemerdekaannya dari Turki, penguasa tunggal Yaman Utara yaitu Imam Yehya menginginkan bersatunya

Ridho Yulian Mulyastanto, 2016

UNIFIKASI YAMAN : PROSES PENYATUAN KEMBALI ANTARA YAMAN UTARA DAN YAMAN SELATAN PADA TAHUN 1972 - 1990

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Yaman dibawah kepemimpinannya. Imam Yehya menginginkan Yaman Selatan yang pada waktu itu dikuasai oleh Inggris masuk ke daerah kekuasaannya. Berkali-kali Imam Yaman itu selalu berusaha ingin mendapatkan kekuasaan atas daerah Yaman Selatan yang pada waktu itu beribu kota di Aden, baik melakukan penyerangan secara militer hingga melakukan diplomasi dengan Inggris. Namun seluruh usaha Sang Imam selalu gagal. Usaha yang Imam Yehya akhirnya terhenti akibat kudeta yang dilakukan oleh Sayyid Abdullah mantan Gubernur wilayah Hodeida dan menteri negara Kudeta ini merenggut nyawa Imam Yehya sang Imam Yaman. Kematian Imam pada 17 Februari 1948 merupakan konflik internal yang pertama terjadi di wilayah ini (Lenczowski, 1992, hlm. 371-372).

Konflik yang bahkan menjadikan perang saudara berkepanjangan di wilayah Yaman Utara, antara kelompok yang menginginkan sistem Republik dengan yang menginginkan bertahannya sistem Kerajaan/Imamah.

Peristiwa kudeta yang dilakukan oleh Sayyid Abdullah membawa ketidakstabilan politik di wilayah Yaman Utara, banyak kelompok yang menolak pemimpin baru Yaman tersebut, karena hingga tak berselang lama peristiwa kudeta kembali terjadi dilakukan oleh Emir Sheif al-Islam Ahmed yang kemudian peristiwa kudeta tersebut menjadikan Emir tersebut menjadi Imam di Yaman Utara. Peristiwa kudeta ini juga membawa Yaman kembali ke sistem kerajaan/imamah (Lenczowski, 1992, hlm. 374-375).

Kemudian peristiwa kudeta tersebut berdampak pula bagi masuknya pengaruhnya negara-negara Arab lainnya, mengutip dalam jurnal karya Fawaz A. Gerges (1992, hlm. 2) yang mengemukakan bahwa *“These external influences led to escalation of the Yemen war. For the next five years, 1962-1967, the conflict was one of the dominant features of Arab politics”*.

Pengaruh negara-negara yang paling kuat di Yaman Utara adalah negara Mesir dengan Pan-Arabisme dan negara Arab Saudi dengan sistem kerajaannya. Mesir mengirimkan senjata dan pasukannya untuk membantu kelompok anti-Imamah sedangkan Arab Saudi memberikan dana finansial kepada pemerintah Imam (Ismail, 2002, hlm. 33). Terbukti pada bulan September tahun 1962, terjadi

lagi peristiwa kudeta yang dilakukan oleh kepala penjaga kerajaan, Abdallah al-Sallal terhadap Mohammed al-Badr yang merupakan anak serta penerus dari Imam Ahmed. Dalam kudeta tersebut terbentuk Dewan Komando Revolusioner, yang dipimpin oleh al-Sallal sendiri. Dia kemudian mengumumkan penghapusan sistem Imamah yang sangat kuno, dengan terjadinya peristiwa tersebut itu, penghapusan dinasti dari keluarga Hamid al-Din dan membentuk Republik Arab Yaman (Gerges, 1995, hlm. 6). Imam yang di bantu oleh Arab Saudi akhirnya kalah, namun peristiwa kudeta tersebut menjadikan konflik berkepanjangan serta perang saudara di Yaman Utara. Yaman Utara menjadi korban dari perang kepentingan antara Mesir dan Arab Saudi yang dimana kedua negara besar tersebut memberikan bantuannya, baik dari kebutuhan militer sampai perekonomiannya. Disebutkan dalam penelitian *Federal Research Division* (2008, hlm. 2) tentang profil negara Yaman yang membahas mengenai sejarahnya :

Civil war ensued between the royalist forces, supported by Saudi Arabia and Jordan in opposition to the newly formed republic, and republicans, supported by Egyptian troops. In 1967 Egyptian troops were withdrawn, and by 1968, following a royalist siege of Sanaa, most of the opposing leaders had reconciled. In 1970 Saudi Arabia recognized the YAR.

Gagalnya Pan-Arabisme yang dipimpin oleh Mesir serta pengaruh dari kekalahan perang enam hari dengan Israel merupakan hal yang sangat mempengaruhi perang saudara di negara Yaman Utara. Pasukan anti-imamah atau republik yaitu pasukan yang sangat tidak setuju dengan sistem pemerintahan kerajaan menjadi tidak mempunyai dukungan lagi, namun dapat berhasil mempertahankan sistem Republik di Yaman Utara. Dengan peristiwa tersebut pula akhirnya negara Arab Saudi pun dengan terpaksa mendukung pemerintahan Republik Arab Yaman (Yaman Utara) dan mengakui kemerdekaan Republik Arab Yaman pada tahun 1970, hingga negara ini ber-unifikasi dengan saudara selatannya yaitu Republik Demokratik Rakyat Yaman (Yaman Selatan) pada tahun 1990 (Pelletiere, 1996, hlm. 16).

Setelah penulis sedikit menjelaskan mengenai permasalahan yang berada di wilayah Yaman Utara, kini penulis akan menjelaskan sedikit mengenai

Ridho Yulian Mulyastanto, 2016

UNIFIKASI YAMAN : PROSES PENYATUAN KEMBALI ANTARA YAMAN UTARA DAN YAMAN SELATAN PADA TAHUN 1972 - 1990

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

permasalahan yang berada di Yaman Selatan. Mengenai Republik Demokratik Rakyat Yaman (Yaman Selatan) ini sangat berbeda dengan saudara utaranya. Setelah Yaman Utara berhasil mendirikan sebuah negara Republik, Yaman bagian selatan masih tetap dikuasai Inggris dari tahun 1839 hingga keluarnya Inggris pada tahun 1967. Pada saat Inggris masih berkuasa atas daerah itu Yaman Selatan bernama Protektorat Aden dan kemudian kekosongan kekuasaan yang berada di sana diambil alih kaum marxisme (Pelletiere, 1996, hlm. 17).

Sebenarnya penyebab yang sangat kuat dari berdirinya negara Yaman Selatan ini adalah dampak dari terjadinya perang dingin antara dua kekuatan *superpower* Amerika Serikat dan Uni Soviet serta berkembangnya pengaruh Pan-Arabisme yang disuarakan oleh Gamal Abdul Nasser pemimpin Mesir. Kedua negara adidaya itu saling memperebutkan hegemoninya di seluruh dunia. Pan-Arabisme juga mulai banyak diadopsi oleh para pemimpin-pemimpin negara Arab lainnya. Tanpa terkecuali di Yaman bagian selatan. Berdirinya Republik Arab Yaman (Yaman Utara) disusul oleh hengkangnya Inggris dari wilayah Yaman Selatan pada tahun 1967. Inggris terpaksa meninggalkan Yaman Selatan khususnya di wilayah Aden karena mulai adanya kesadaran politik serta masuknya pengaruh Naserisme (Pelletiere, 1996, halm. 17).

Di Aden sendiri sebenarnya sejak Oktober 1961 sudah ada kelompok marxisme yang menamakan dirinya *People's Democratic Union* (PDU) yang dipimpin oleh Abdallah bin Abd al-Razzaq Ba Dhib (Pridham, 1984, hlm 133). Selain itu terdapat pula kelompok *Front for the Liberation of Occupied South Yemen* (FLOS Y) atau Front Pembebasan Pendudukan Yaman Selatan (Halliday, 1990, hlm. 8). Namun yang berhasil mengambil kesempatan ini adalah kelompok *National Liberation Front* (NLF) atau Front Pembebasan Nasional yang dipimpin oleh Qahtan al-Sha'abi. Karena pada tahun yang sama dengan perginya Inggris dari Yaman Selatan, yaitu pada tahun 1967 kaum marxisme pimpinan Qahtan al-Sha'abi ini dengan cepat mendeklarasikan berdirinya negara *People's Republic of South Yemen* atau Republik Rakyat Yaman Selatan (Yaman Selatan). Golongan

NLF menggunakan kesempatan tersebut untuk membuat negara sendiri yang berpaham politik Sosialis (Halliday, 1985, hlm. 40-41).

Setelah berdirinya negara Yaman Selatan, konflik internal pun mulai menggeroti pemerintahan yang baru berdiri ini. Kelompok Front Pembebasan Pendudukan Yaman Selatan (FLOSYP) yang berhaluan politik Nasionalis dan juga merupakan rival dari kelompok Front Pembebasan Nasional (NLF) sejak negara ini belum berdiri melakukan *coup* terhadap pemerintahan resmi yang baru berdiri tersebut. Namun peristiwa kudeta tersebut mengalami kegagalan yang berdampak bubarnya kelompok FLOSYP pada tahun 1967 (Halliday, 1985, hlm. 41)

Setelah berdirinya negara baru tersebut, pengaruh perang dingin khususnya pengaruh Uni Soviet dan blok timur kini mulai menancap di negeri Yaman, kejadian itu juga mengakibatkan runtuhnya rejim-rejim kolot para sultan lokal di negeri Yaman (Kim, 2013, hlm 28). Namun keberhasilan Qahtan al-Shaabi mendirikan negara baru ini bertahan hingga pertengahan tahun 1969, karena pada tanggal 22 Juni pada tahun yang sama *clash* kembali terjadi, kali ini antara Qahtan al-Shaabi dengan Menteri Dalam Negeri yaitu Muhammad Ali Haytam yang termasuk kedalam anggota kelompok NLF serta para petinggi pemerintahan lainnya. Penyebab *clash* tersebut dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai sistem pemerintahan di negara Republik Rakyat Yaman Selatan. Muhammad Ali Haytam yang bekerjasama dengan Menteri Pertahanan Muhammad Shalih 'Awlaki melakukan *coup* kepada Qahtan al-Shaabi yang mengakibatkan runtuhnya rezim Qahtan al-Shaabi yang lebih moderat tersebut (Halliday, 1985, hlm. 40).

Peristiwa kudeta yang terjadi pada negara Republik Rakyat Yaman Selatan kini membawa banyak perubahan di negara Yaman Selatan. Sebenarnya selain perbedaan dalam sistem pemerintahan di Yaman, kudeta yang dilakukan oleh Muhammad Ali Haytam juga merupakan perbedaan dalam konsep kepartaian dan politik luar negeri Yaman (Halliday, 1985, hlm. 41). Ali Haytam sendiri merupakan anggota yang termasuk dalam golongan marxisme radikal di dalam organisasi NLF. Berbeda dengan al-Shaabi yang merupakan marxisme yang lebih

moderat. Perubahan sistem pemerintahan yang dilakukan pemimpin baru Yaman Selatan pada tahun 1970 dari sistem yang awalnya tidak menerapkan konstitusional menjadi sistem konstitusional membawa pengaruh juga terhadap perubahan nama negara, yang awalnya *People's Republic of South Yemen* atau Republik Rakyat Yaman Selatan menjadi *People's Republic Democratic of Yemen* atau Republik Demokratik Rakyat Yaman. Presiden baru Yaman Selatan digantikan oleh Salim Rubai Ali dengan Muhammad Ali Haytam sebagai Perdana Menteri (Mylroie, 1983, hlm. 16).

Hingga tahun 1971, di wilayah Yaman telah berdiri dua negara yaitu Republik Arab Yaman (Yaman Utara) dengan sistem pemerintahan Republik yang dipimpin oleh seorang presiden, yaitu Presiden Abdallah as-Sallal dan Republik Demokratik Rakyat Yaman (Yaman Selatan) yang menganut sistem pemerintahan komunisme ala Uni Soviet yang dipimpin oleh Presiden dan juga Perdana Menteri, yaitu Salim Rubai Ali dan Muhammad Ali Haytam.

Terbentuknya dua negara yaitu Yaman Utara dan Yaman selatan merupakan salah satu penyebab terhambatnya proses Unifikasi atau penyatuan kembali negara Yaman yang sebenarnya sudah direncanakan oleh penguasa Yaman Utara pada saat itu. Ditambah banyaknya konflik dan kudeta yang melanda pada masing kedua negara tersebut juga menjadikan Yaman semakin jauh dari proses unifikasi. Baru pada tahun 1972 kedua negara ini dengan masing-masing pemimpinnya yaitu presiden Yaman utara Al-Hamdi dan pemimpin Yaman selatan Rubay'a Ali mengadakan pertemuan untuk membahas proses penyatuan kembali negara Yaman. Namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil yang sangat berpengaruh, karena setelah pertemuan tersebut, kedua negara ini kembali terlibat konflik baik internal dan eksternal. Konflik eksternal yang dimaksud adalah konflik dengan saudaranya utaranya, yaitu Yaman Utara. Namun konflik tersebut tidak menyebabkan terjadi perang, hanya menimbulkan ketegangan di daerah perbatasan.

Peristiwa kudeta terjadi di Yaman utara pada tahun 1978, terbunuhnya presiden Al-Hamdi oleh para pemberontak yang kurang puas terhadap

kepemimpinannya. Peristiwa kudeta tersebut membawa Ali Abdullah Shalleh menjadi pemimpin di wilayah Yaman utara (Ismail, 2002, halm. 24). Pergantian pemimpin yang terjadi di Yaman utara membawa negara Yaman utara semakin dekat hubungannya dengan negara Arab Saudi. Selain membawa hubungannya semakin baik dengan Arab Saudi, peristiwa tersebut juga membawa arah penyatuan kembali dengan Yaman selatan semakin dekat (Dunbar, 1992, halm. 470). Karena pada tahun 1979, kedua pemimpin Yaman ini melakukan pertemuan kembali untuk membahas mengenai proses unifikasi.

Selain Yaman utara yang juga melakukan hubungan baik dengan Arab Saudi, Yaman selatan pun melakukan hal serupa. Negara Yaman selatan melakukan hubungan kerjasama dengan negara Arab Saudi dalam hubungan politik dan ekonomi. Tujuan Arab Saudi melakukan hubungan kerjasama dengan kedua negara Yaman ini agar kedua negara Yaman ini dapat segera melakukan *integration unification* (Lu, 2010, halm. 112).

Setelah ketegangan - ketegangan yang dialami dua negara Yaman tersebut, akhirnya pada penghujung tahun 1980 presiden Yaman Utara Ali Abdullah Shaleh bertemu dengan Presiden Yaman Selatan Ali Nassir Muhammad untuk membahas kembali mengenai proses penyatuan antara dua negara Yaman tersebut. Hasil dari pertemuan antara kedua pemimpin Yaman tersebut berdampak pada perjanjian – perjanjian yang lebih mengarahkan kepada proses penyatuan antara kedua negara.

Hasil dari perjanjian yang terlaksana pada tahun 1980 tersebut menghasilkan empat fase yang dimana fase - fase tersebut berupa pertemuan yang membicarakan mengenai perjanjian-perjanjian lainnya untuk memuluskan jalan menuju proses penyatuan. Fase pertama adalah terlaksananya pertemuan di Taizz pada tanggal 16-18 April 1988 antara presiden Yaman utara Ali Abdullah Shaleh dengan perdana menteri Yaman Selatan, Salim al-Beidh yang meneruskan pembahasan mengenai unifikasi yang sebelumnya sudah terlaksana. Kemudian pada tanggal 4 Mei 1988 di ibukota Yaman utara yaitu Sana'a yang juga membicarakan mengenai kelanjutan dari rencana proses penyatuan kembali negara Yaman, dilanjutkan pada tanggal 1 Juni 1988 dan kemudian fase yang

terakhir adalah pada tanggal 19 November 1988, fase ini merupakan pembicaraan dan pertemuan terakhir sebelum proses unifikasi dilakukan (Dunbar, 1992, hlm. 459). Setelah fase tersebut terlaksana akhirnya pada tahun 1989 kedua negara ini mulai mempersiapkan lebih serius untuk proses unifikasi yang dimana proses penyatuan kedua negara Yaman ini sudah di cita-citakan oleh penguasa Yaman utara yaitu Imam Yehya juga oleh para penduduk Yaman bagian utara dan Yaman bagian Yaman selatan.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Yaman ini sangat menarik bagi peneliti karena permasalahan yang telah sedikit dibahas tersebut menjadi penghambat dari proses unifikasi yang terjadi di Yaman. Proses unifikasi di Yaman antara Yaman utara dan Yaman selatan yang baru terjadi pada tahun 1990 ini juga terhitung lambat di banding dengan bersatunya negara-negara arab yang lainnya terutama dari negara sebelah utaranya yang sudah lebih dahulu ber-Unifikasi yaitu Arab Saudi, sehingga membuat negara Yaman ini menjadi salah satu negara terbelakang di kawasan Timur Tengah bahkan menjadi negara terbelakang pula dibanding negara-negara dunia lainnya. Bahkan hingga saat ini negara Yaman yang telah bersatu pun masih tetap dilanda konflik.

Ketertarikan penulis terhadap permasalahan yang terjadi di wilayah negara Yaman pada tahun 1990 yaitu pada peristiwa bersatunya kembali Yaman Utara dan Yaman Selatan timbul dari rasa penasaran penulis terhadap kajian Timur Tengah khususnya wilayah Yaman. Di Indonesia sendiri, untuk mengetahui sejarah ataupun permasalahan yang berada di wilayah Yaman sangatlah sulit. Sulit dikarenakan sumber-sumber tulisan yang membahas mengenai wilayah Yaman ini sangatlah jarang. Kebanyakan yang melakukan kajian dan penulisan mengenai permasalahan yang berada di Yaman ini adalah orang-orang yang bukan berasal dari Indonesia. sehingga jika menemukan tulisan yang membahas mengenai permasalahan di wilayah Yaman maka bahasa yang digunakan dalam tulisan itu adalah bahasa asing.

Dalam pembahasan yang dilakukan dalam penulisan ini sebenarnya sangat berhubungan dengan konflik yang terjadi di Yaman hingga saat ini. Setelah proses

penyatuan yang dilakuakn antara dua Yaman pada tahun 1990, wilayah Yaman Utara lah yang merupakan tempat pusat pemerintahan dari negara Yaman bersatu. Pemerintah pusat yang berada di Yaman Utara selalu menganaktirikan wilayah-wilayah yang berada di Yaman Selatan, sehingga selalu menimbulkan demonstrasi-demonstrasi dan bentrokan hebat antara warga yang berada di kawasan Yaman bagian Selatan dengan pemerintah Yaman bersatu.

Dengan penulisan mengenai *Unifikasi Yaman: Proses Penyatuan Kembali Yaman Utara dan Yaman Selatan Pasca Berakhirnya Perang Dingin tahun 1990* semoga dapat membantu dalam keterbatasan sumber mengenai peristiwa yang berada di Yaman khususnya peristiwa di Yaman pada tahun 1990.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini. Adapun pertanyaan pada permasalahan pokoknya adalah *Mengapa Unifikasi Yaman baru terjadi pada tahun 1990 ?*

Sementara untuk membatasi kajian penelitian ini, maka diajukan beberapa pertanyaan sekaligus sebagai rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi Yaman Utara dan Yaman Selatan sebelum terjadinya unifikasi ?
2. Apakah penyebab konflik-konflik yang terjadi Yaman sebelum terjadinya unifikasi pada Tahun 1990 ?
3. Bagaimana proses terjadinya unifikasi antara Yaman Utara dan Yaman Selatan pada tahun 1990 ?
4. Bagaimana dampak dari proses unifikasi yang dilakukan oleh Yaman Utara dan Yaman Selatan terhadap keadaan politik dan ekonomi di negara Yaman yang telah bersatu ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan kondisi Yaman Utara dan Yaman Selatan sebelum terjadinya unifikasi dalam kondisi politik, ekonomi serta kondisi sosial di Yaman.
2. Menjelaskan penyebab terjadinya konflik-konflik yang ada di Yaman sebelum terjadinya unifikasi.
3. Menjelaskan penyebab terjadinya proses unifikasi Yaman antara Yaman Utara dan Yaman Selatan.
4. Menjelaskan mengenai dampak dari terjadinya proses unifikasi Yaman terhadap keadaan sosial, ekonomi, dan politik di negara Yaman yang telah bersatu.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan pembaca dan memperkaya ilmu pengetahuan terutama sejarah kawasan Asia pada umumnya dan sejarah Republik Yaman khususnya.
2. Memberikan sumbangan pemikiran khasanah kepustakaan mengenai sejarah Yaman dari berbagai kepentingan pendidikan yang bermanfaat bagi kemajuan pendidikan Indonesia.
3. Salah satu sumber referensi dalam materi mata pelajaran Sejarah di SMA kelas XI yang sesuai dengan SKKD yaitu mendeskripsikan pergerakan kebangsaan di Asia dan Afrika

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian karya ilmiah ini adalah metode historis yang merupakan suatu metode yang lazim

dipergunakan dalam penelitian sejarah. Menurut Sjamsudin (2001: hlm. 17-19),
 Ridho Yulian Mulyastanto, 2016
UNIFIKASI YAMAN : PROSES PENYATUAN KEMBALI ANTARA YAMAN UTARA DAN YAMAN SELATAN PADA TAHUN 1972 - 1990

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

metode historis yaitu suatu proses pengkajian, penjelasan dan penganalisaan secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau.

Adapun langkah-langkah yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian sejarah ini sebagaimana dijelaskan oleh Ismaun (2005, hlm. 48-50) adalah sebagai berikut :

1. Heuristik

Heuristik yaitu pengumpulan sumber-sumber yang relevan dengan masalah yang akan diangkat oleh penulis. Cara yang akan dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan sumber-sumber, buku-buku, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Sumber penelitian sejarah terbagi menjadi tiga yaitu sumber benda, sumber tertulis dan sumber lisan.

Untuk mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan studi literatur. Studi literatur digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan fakta dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian yang dikaji, baik literatur lokal maupun asing yang semua itu dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang hendak dikaji. Sumber yang dapat dikumpulkan penulis hanya sumber tertulis yang merupakan sumber sekunder. Oleh karena itu penulis hanya akan melakukan teknik studi literatur ini karena disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji.

2. Kritik

Setelah menemukan sumber sejarah yang diperlukan langkah peneliti selanjutnya yaitu melakukan kritik, kritik sendiri yaitu memilih dan menyaring keotentikan sumber-sumber yang telah ditemukan. Kritik dilakukan dengan dua cara yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah cara melakukan verifikasi terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah serta kritik internal adalah aspek dalam atau isi dari sumber hingga fakta. Pada tahapan ini penulis melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber yang didapat untuk mendapatkan kebenaran sumber.

3. Interpretasi

Interpretasi yaitu memaknai atau memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh dengan cara menghubungkan fakta-fakta satu sama lain. Tahapan interpretasi ini dilakukan dengan cara menafsirkan fakta dan data yang kemudian disusun, ditafsirkan, dan dihubungkan satu sama lain sehingga diperoleh sebuah analisis yang didukung oleh konsep-konsep tertentu yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

4. Historiografi

Historiografi yaitu penulisan sejarah tahapan terakhir dalam penelitian sejarah. Dalam tahapan ini peneliti menyajikan hasil temuan pada tiga tahapan sebelumnya dengan cara menyusun dalam bentuk tulisan dengan gaya bahasa yang sederhana dan menggunakan tata bahasa penulisan yang baik dan benar serta disusun secara kronologis, deskriptif naratif dengan penjelasan serta analisis menggunakan pendekatan interdisipliner

1.6. Struktur Organisasi Skripsi

Adapun struktur dalam penulisan karya ilmiah yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah yang menjelaskan alasan mengapa masalah yang diteliti timbul, rumusan masalah yang disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan untuk memudahkan peneliti mengkaji dan mengarahkan pembahasan, tujuan penelitian, metode dan teknik penelitian serta struktur organisasi.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini dipaparkan mengenai sumber-sumber buku dan sumber lainnya seperti jurnal dan internet yang relevan dan dapat

Ridho Yulian Mulyastanto, 2016

UNIFIKASI YAMAN : PROSES PENYATUAN KEMBALI ANTARA YAMAN UTARA DAN YAMAN SELATAN PADA TAHUN 1972 - 1990

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

digunakan sebagai sumber referensi. Selain itu menggunakan di dalamnya juga terdapat pembahasan mengenai pendekatan teoritis dari ilmu sosiologi dan politik serta dijelaskan juga mengenai beberapa kajian dan penelitian terdahulu mengenai bahasan yang akan ditulis oleh penulis.

Bab III Metode Penelitian, di dalam bab ini di uraikan mengenai tahapan yang dilakukan dan ditempuh oleh peneliti ketika melakukan penelitian mengenai *Unifikasi Yaman: Proses Penyatuan Kembali Yaman Utara dan Yaman Selatan Pasca Berakhirnya Perang Dingin tahun 1990* guna mendapatkan data dari sumber yang relevan dengan masalah yang dikaji. Adapun metode yang digunakan adalah metode historis dan teknik yang digunakan adalah teknik studi literatur.

Bab IV Isi dan Pembahasan, bab ini merupakan bab yang di dalamnya menjelaskan serta akan mendeskripsikan mengenai penyebab terjadinya Unifikasi di Yaman, kondisi sosial, ekonomi dan politik pada saat sebelumnya terjadi proses Unifikasi serta mengenai pengaruh Unifikasi Yaman bagi dunia Internasional dan bagi negara Yaman itu sendiri.

Bab V Simpulan dan Saran, bab ini merupakan pembahasan terakhir dan dikhususkan untuk memberikan kesimpulan pada pembahasan Bab IV dan dituangkan juga mengenai hasil analisis penulis secara menyeluruh yang menggambarkan tentang bahasan penelitian penulis.

Daftar Pustaka

- A World Bank Country Study. 1979. *People's Democratic Republic of Yemen*. Washington, DC: A World Bank Country Study.
- Bidwell, R. L. 1983. *The Two Yemen*. London: Longmen Group and Westview Press.
- Dispoyudo, K. 1977. *Timur Tengah Dalam Pergolakan*. Jakarta: Yayasan Proklamasi
- Duverger, M. 1982. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hitti, P. K. 2002. *History of The Arabs*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Kartodirdjo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kazziha, W. 1985. *Transformasi Revolusioner di Dunia Arab*. Jakarta: Grafindo Utama.
- Lenczowski, G. 1992. *Timur Tengah dikancah Dunia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

- Milroie, L. 1983. *Politic and The Soviet Presence in The People's Republic Democratic of Yemen: Internal Vulnerabilities and Regional Challenges*. California: A Rand Note
- Pelletiere, S.C. 1996. *Yemen And Stability In The Persian Gulf: Confronting The Threat From Within*. Carlisle, Pennsylvania: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College
- Stookey, Robert.W. 1978. *Yemen: The Politics of The Yemen Arab Republic*. London: Westview Press.
- Sjamsudin, H. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Soekanto, S. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supardan, D. 2008. *Pengantar Ilmu Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wenner, M.W. 1991. *The Yemen Arab Republic: Development and Change in a Ancient Land*. London: Westview Press.

Artikel Jurnal:

- Dunbar, C. (1992). “*The Unification of Yemen: Process, Politic, dan Prospects*”. [Online].
www.jstor.org/discover/10.2307/4328466?uid=3738400&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21104135552791.htm. [Diakses 8 September 2014]
- Gerges, F. A. (1995). “*The Kennedy administration and the Egyptian-Saudi conflict in Yemen: Co-opting Arab Nationalism*”. [Online].
<http://www.questia.com/library/journal/1P3-6969321/the-kennedy-administration-and-the-egyptian-saudi#.htm>. [Diakses 9 September 2014].
- Lu, X. (2010). “*Regional Factors in Yemen's Integration Reunification*”. [Online].

<http://research.shisu.edu.cn/picture/article/13/ad/24/7fc5a2764fe39852c873b566005f/c41bd560-2758-47a1-ba5b-2cd3d94dd67c.pdf.htm>. [Diakses 9 September 2014].

Ferris, J. (2008). "*Soviet Support for Egypt's Intervention in Yemen, 1962-1963*". [Online]. www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/jcws.2008.10.4.5#/doi/abs/10.1162/jcws.2008.10.4.5.htm. [Diakses 10 September 2014]